

Meningkatkan Angka Partisipasi Pemilih Pemula Melalui Peran Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ariandi A Zulkarnain¹, Ririn Septia², Robing Robing³, Irvan Ansyari⁴

^{1,2,3,4}Political Science Department, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

¹ariandi@ubb.ac.id ²ririnseptia@ubb.ac.id ³robing@ubb.ac.id ⁴irvan@ubb.ac.id

Abstract

This research was conducted to find out the strategy of the Bangka Belitung Provincial KPU in increasing public participation, especially in the 2024 general election. The Bangka Belitung Provincial KPU itself has several agendas, namely conducting outreach especially for first time voters at school. The KPU target for the Bangka Belitung Province, especially in the 2024 general election, is about 75%. The problem encountered in conducting this research is that basically the Bangka Belitung Provincial KPU does not have definite data in measuring the turnout rate of first-time voters in Bangka Belitung. This research uses a qualitative method. Primary data, namely data obtained by directly assigning research results to the object of investigation. Secondary data, namely information obtained from other third parties, such as institutional documents, books, print media, and online. This data is taken from data conducted by the Bangka Belitung Provincial KPU in comparing voter turnout between 2019 and 2024. The results of this study indicate that the election problems that occurred in 2019 were due to the lack of indication of appreciation or interest from the public for problems or activities of the countries under them. participation rate. Therefore, efforts and strategies are needed in holding elections for the 2024 elections, one of which is providing education for first-time voters to increase the participation rate of first-time voters. Regarding efforts and strategies in holding elections for 2024, the Bangka Belitung Provincial KPU is the election management body. Where efforts to implement these preparations are carried out in stages.

Keyword: *Commission for General Elections (KPU), Elections, and Beginner Participation*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi KPU Provinsi Bangka Belitung dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terutama dalam pemilihan umum 2024. KPU Provinsi Bangka Belitung sendiri memiliki beberapa agenda yaitu melakukan sosialisasi terutama bagi para pemilih pemula di Sekolah. Adapun Target KPU Provinsi Bangka Belitung terutama di pemilihan umum 2024 yang targetnya yaitu sekitar 75%. Permasalahan yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini yaitu pada dasarnya KPU Provinsi Bangka Belitung tidak memiliki data yang pasti di dalam mengukur angka partisipasi pemilih pemula di Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara langsung menugaskan hasil penelitian pada objek penyelidikan. Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak ketiga lainnya, seperti, kelembagaan dokumen, buku, media cetak, dan online. Data ini diambil dari data yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bangka Belitung di dalam membandingkan partisipasi pemilih antara 2019 dan 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Permasalahan Pemilu yang

terjadi pada Tahun 2019 adalah dikarenakan minimnya indikasi penghargaan atau minat dari masyarakat terhadap masalah atau kegiatan negara di bawahnya tingkat partisipasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan strategi dalam penyelenggaraan pemilu untuk pemilu tahun 2024 salah satunya memberikan pendidikan bagi pemilih pemula guna meningkatkan angka partisipasi pemilih pemula Mengenai upaya dan strategi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, KPU Provinsi Bangka Belitung sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Di mana upaya pelaksanaan persiapan tersebut dilakukan secara bertahap.

Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilu, dan Partisipasi Pemula

Pendahuluan

KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pesta demokrasi di Indonesia setiap 5 tahun sekali. Di dalam menjalankan tugasnya adapun pembagian tugas dari KPU untuk memberikan sebuah wewenang bagi lembaga dibawah naungan KPU yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilu di setiap daerah mulai dari PPK, PPS, KPPS, KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi, serta KPU Nasional. Sehingga pelaksanaan KPU lebih terlaksana secara terstruktur tanpa adanya tumpang tindih pembagian tugas karena setiap lembaganya telah diberi tugas masing masing dan harus bertanggungjawab atas jalannya pemilu dengan menjunjung tinggi asas pemilu itu sendiri jujur, adil, bebas dan rahasia.

Sebelum melakukan penyelenggaraan pemilu, KPU sendiri memiliki tugas sebagai lembaga yang memverifikasi para peserta/kandidat pemilu yang nantinya akan bertarung baik partai politik maupun calon perseorangan. Di dalam menghadapi verifikasi ini tidak sedikit permasalahan yang ditimbulkan yaitu adanya syarat dari KPU bagi peserta pemilu di dalam

memenuhi kriteria yang ditetapkan. Bagi peserta yang lolos verifikasi maka merekalah yang siap bertarung namun bagi partai atau perseorangan yang tidak lolos biasanya mereka akan melakukan protes atas ketidakpuasan tersebut dan salah contoh yang related yaitu banyaknya sengketa pemilu terutama di dalam menghadapi pemilu 2024 yang digugat oleh partai partai baru yang dianggap tidak lolos persyaratan sehingga melayangkan gugatan mereka dan isu terbaru yaitu adanya keinginan Partai Prima di dalam menunda pemilu yang disetujui oleh PN Jakarta Pusat.

Meskipun begitu KPU sendiri mengemban aspek profesionalitas yaitu menyiapkan alat alat pemilu baik kertas suara, bilik suara, tinta, tanda pengenalan petugas, bilik segel suara, dan lain lain di dalam menjamin pemilu yang dijalankan bebas dari kecurangan serta tidak lupa mengawasi jalannya kampanye dan proses perhitungan suara yang dibantu juga oleh Bawaslu dan DKPP. Adapun saran bagi KPU di dalam melakukan efisiensi dana penyelenggaraan pemilu yaitu memanfaatkan teknologi E-Voting yang dianggap lebih mudah dan murah tanpa harus datang ke TPS

mengingat banyaknya pemilih dari generasi Milenial dan Z yang tidak lepas dari teknologi walaupun begitu penggunaan E-Voting di Indonesia belum didukung dikarenakan adanya beberapa wilayah di Indonesia belum memiliki jaringan internet dan banyaknya para cyber army di dalam meretas data pemilu

Pemilu merupakan sarana maupun wadah yang bertujuan untuk membentuk perwakilan politik. Setiap Warga negara memilih perwakilan mereka dalam pemilihan untuk mengekspresikan suara dan kepentingan mereka. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPRD dan DPD, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, terbuka. Bebas, melalui kepercayaan, kejujuran dan integritas dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kualitas pemilu diukur dari keterwakilan yang dicapai oleh sistem pemilu. Semakin tinggi representasi politik warga negara, semakin tinggi kualitas pemilu. Sebaliknya, representasi yang rendah adalah tanda kegagalan sistem ini. Oleh karena itu, pemilu yang berkualitas dan demokratis dipengaruhi oleh perpaduan tiga pilar, yaitu. undang-undang pemilu, proses pemilu dan penyelenggaraan pemilu.

Partisipasi politik merupakan bagian yang banyak diperhatikan public karena peran warga negara yang sangat dibutuhkan dalam pemilihan parlemen. Partisipasi pemilih dalam pemilu diperlukan karena mereka memutuskan pilihan pemimpin sesuai dengan keputusan warga negara. Sehingga pemimpin tersebutlah yang akan menjalankan pemerintahan contohnya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden kemudian peran warga negara untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang akan mereka pimpin selama lima tahun kedepan.

Pemilih pemula yang beridentitas warga negara Indonesia (WNI) dan sudah genap berusia 17 tahun pada hari pemilihan atau pemungutan suara serta sudah/pernah menikah. Sehingga artinya pemilih pemula merupakan pemuda penerus generasi bangsa yang menentukan keberlangsungan sistem politik di Indonesia. Karena pemilih pemula yang menentukan orientasi politik ke depan sebagai aktor politik. Partai politik memperdayakan para pemilih pemula melalui kampanye gunanya untuk menambahkan jumlah suara pemilih.

Fokus perhatian pemilu 2019 Bangka Belitung antaranya dilihat dari jumlah partisipasi pemilih serta banyak pemilih pemula yang masih belum paham mengenai tata cara memberikan hak pilih mereka. Hal ini KPU bisa melakukan upaya maupun strategi untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemula di pemilu 2024 dengan

melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau bahkan ke sekolah untuk memberikan pengetahuan bagaimana tata cara dalam pemilihan dengan benar. Serta mendorong partai politik menjalankan kampanye untuk mengerakan pemilih untuk memilih.

Metode Penelitian

Istilah penelitian kualitatif yang dicetuskan oleh Kirk & Miller (Nasution 1988:23) pada mulanya lebih didasarkan pada pengamatan kualitatif daripada kuantitatif. Mereka kemudian mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu-ilmu sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dengan cara mereka sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan terminologi mereka. Penelitian kualitatif memiliki karakteristik atau karakteristik yang membedakannya dengan jenis penelitian lainnya.

Secara umum, penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan penggunaan metode kualitatif adalah pengalaman peneliti yang dapat menggunakan metode ini untuk menemukan dan memahami apa yang ada di balik fenomena yang terkadang sulit

dipahami secara memuaskan. Dalam penelitian kualitatif, teori didefinisikan sebagai paradigma. Seorang peneliti baik secara eksplisit menyatakan atau tidak menerapkan suatu paradigma tertentu dalam kegiatan penelitiannya agar penelitian menjadi lebih terarah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang di mana dengan memberi deskripsi dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih pemula terhadap peran kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di mana terdapat data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara langsung menugaskan hasil penelitian pada objek penyelidikan. Dalam penelitian ini, informasi dasar diperoleh dari diskusi kelompok terarah dan wawancara langsung dengan responden atau pihak yang terlibat.

Data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak ketiga lain, seperti informasi yang diperoleh dari otoritas terkait atau orang dari pihak yang mengumpulkan dan mengirimkan informasi, seperti, dokumen kelembagaan, buku, media cetak, dan online. Yang di mana ini dilakukan dengan mencari dan menghasilkan informasi, baik secara tertulis maupun dalam tulisan yang berhubungan dengan penelitian. Untuk penelitian ini tersedia dari kantor KPU, serta sumber tertulis yaitu, buku-buku atau literature yang berhubungan dengan judul dan topik penelitian ini. Data ini diambil dari

data yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bangka Belitung di dalam membandingkan partisipasi pemilih antara 2019 dan 2024.

Kontekstualisasi Teori Dan Konsep Penelitian

Penelitian dan konsep masih menjadi alat analisis. dalam penelitian ini dengan cara mengkonseptualisasikan peningkatan angka partisipasi pemilih pemula melalui peran kelembagaan Komisi Pemilihan Umum di Bangka Belitung. konsep dari partisipasi itu sendiri memiliki banyak pengertian, diantaranya partisipasi adalah sebuah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, yang mana ia juga terlibat dalam situasi baik itu secara mental, pikiran atau emosi serta perasaan yang mendorongnya untuk memberikan upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

Konsep partisipasi masyarakat telah diimplementasikan di seluruh dunia sejak tahun 1970-an lalu digunakan secara luas di bidang pembangunan seperti pembangunan pendesaan, pembangunan berkelanjutan, pengembangan masyarakat dan pemerintahan. menurut *Ramlan Surbakti dalam bukunya yang berjudul memahami ilmu politik (2005)*, menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga negara dalam memberi keputusan yang akan mempengaruhi

hidupnya, partisipasi masyarakat adalah hasil dari proses pengembangan serta pemberdayaan yang mencakup pengambilan keputusan individu.

Maka dari itu untuk mendukung partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam konteks politik tersebut dilakukan kegiatan demokratis melalui pemilihan umum, pemilu dianggap sebagai suatu indikator utama dalam negara demokrasi karena rakyat atau warga negara menggunakan hak suara mereka, melaksanakan hak politiknya serta menentukan pilihannya secara langsung dan bebas. masyarakat menjadi faktor penting dalam tatanan demokrasi karena demokrasi tersebut mendasari pada logika kesepakatan bahwa pemerintah itu memerlukan persetujuan dari yang diperintah. maka dari itu, penyelenggara pemilu sebagai suatu bentuk sarana dalam demokrasi tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat itu sendiri. dalam mendukung konsep dan pendekatan tersebut penulis menggunakan teori partisipasi dan teori kelembagaan dalam jurnal ini untuk melihat peran dan pengaruh dalam keterlibatan masyarakat. adapun sebagai berikut:

Teori partisipasi

Menurut Midgley (1986), histori partisipasi masyarakat merupakan warisan ideologi barat, kontribusi suatu pekerjaan sosial, serta pengaruh dari pengembangan

masyarakat. kelompok dalam konsep partisipasi dalam pengembangan adalah bentuk dari nilai dan manifestasi sebuah organisasi. partisipasi adalah dalam arti keikutsertaan atau proses bersama dari pemahaman, perencanaan, analisis dan tindakan di antara beberapa anggota masyarakat. meskipun ada perbedaan pendapat dalam literatur tentang asal usul teori partisipasi, teori ini berakar pada ilmu politik dan teori pembangunan. dalam teori partisipasi ini mendorong orang-orang untuk menerima tanggungjawab dalam aktivitas kelompok. proses sosial yang dilaluinya akan membuat orang-orang menjadi terlibat dan mewujudkan sebuah keberhasilan. masyarakat atau kelompok yang terlibat sebagai sebuah satu kesatuan dapat disebut sebagai partisipasi kolektif, jika keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok disebut sebagai partisipasi individual. partisipasi ini merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri. Masyarakat yang mandiri akan menjadi masyarakat yang bertanggungjawab, memberikan dukungan ke pemerintah, dan menciptakan tingkat kesadaran berpolitik

Teori kelembagaan

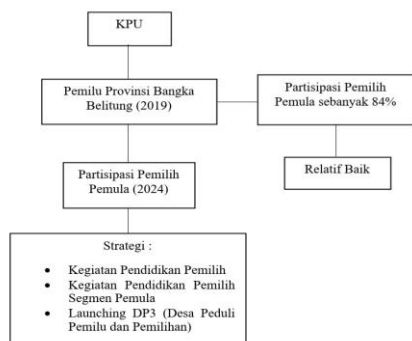
KPU (komisi pemilihan umum) sebuah lembaga penyelenggara pemilu bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam

melaksanakan pemilu. KPU sendiri memiliki beberapa tugas, diantaranya: menjabarkan program dan melaksanakan anggaran, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum di Bangka Belitung menjadi faktor penting dalam proses peningkatan angka partisipasi pemilih pemula di Provinsi Bangka Belitung. yang mana pemilih pemula di Provinsi Bangka Belitung banyak yang belum paham dalam menggunakan hak suara, hak pilih mereka. hal ini lah yang kemudian harus menjadi fokus kpu sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas pemilu. lembaga yang telah terbentuk diatas negara harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan pedoman kelembagaan yang telah diatur. kepentingan masyarakat menjadi hal yang wajib bagi pemerintah untuk lebih mendahulukannya. berbicara mengenai kelembagaan, kelembagaan merupakan sebuah struktur sosial dengan ketahanan tertinggi dengan terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang sarat dengan sebuah perubahan. pada teori kelembagaan juga bisa digunakan dalam menjelaskan peran pengambilan sebuah keputusan,

dengan teori kelembagaan ini menjadi penjas yang cukup kuat dan populer bagi setiap individu yang ingin mengambil tindakan.

Kerangka teori penelitian



Hasil Dan Pembahasan

Identifikasi Permasalahan Pemilu Pada Tahun 2019

Indonesia pada tahun 2019 lalu telah melaksanakan konstestasi politik 5 (lima) tahunan dengan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) serentak pertama kali dalam sejarah dengan menggabungkan pemilu presiden dan pemilu legislatif secara bersamaan. Dapat dikatakan Pemilu serentak ini adalah pemilu dengan penyelenggaraan tingkat kompleksitas yang tinggi. Selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 juga harus memilih anggota legislatif yaitu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang diatur dalam putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 dan UU Pemilu No 7 Tahun 2017.

Indikator terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah tertinggi oleh rakyat (kedaulatan rakyat) adalah partisipasi politik. Di negara demokrasi, partisipasi politik dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemilihan secara langsung. Indikasi bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan adalah semakin tinggi tingkat partisipasi politik rakyat itu sendiri. Di sisi lain, indikasi kurangnya penghargaan atau minat dari masyarakat terhadap masalah atau kegiatan negara adalah rendahnya tingkat partisipasi. Sikap golongan putih (golput) dalam pemilu merupakan cerminan dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat (Ardipandanto, 2019).

Pemilu Serentak 2019 merupakan salah satu konstestasi politik terbesar dalam sejarah perpolitikan Indonesia dan termasuk didunia. Oleh karena itu, dalam penyelenggarannya diperlukan kerja ekstra antar lembaga negara guna mendukung pemilu serentak ini benar-benar elektoral. Dalam hal ini peran kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga resmi penyelenggara pemilihan umum memiliki peranan penting dalam mensosialisasikan Pemilu Serentak ini kepada masyarakat, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum apalagi di era hari ini dengan kemajuan teknologi

yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri buat penyelenggara pemilu dalam mengatur teknis saat pemilihan berlangsung.

Apalagi memasuki era demokrasi elektoral saat ini dimana setiap suara individu menjadi sangat berharga, baik perempuan, kaum marjinal, penyandang disabilitas, pengangguran, dan lain-lainnya, mereka memiliki hak suara yang sama. Oleh karena itu peran kelembagaan KPU harus disadari dengan mencoba metode atau hal baru dalam meningkatkan partisipasi terutama bagi pemilih pemula yang akan memilih pertama kali pada pemilu 17 Februari 2024 mendatang. Di Indonesia, partisipasi politik masyarakat masih terfokus pada penggunaan saluran untuk menyalurkan aspirasi politik melalui pemilihan umum. Partai politik masih dipandang sebagai satu-satunya wadah aspirasi politik ketimbang sarana distribusi lainnya. Meski begitu, bangsa Indonesia telah belajar banyak dari proses demokrasi yang diperkenalkan sejak tahun 1999, yakni pada masa transisi pasca runtuhnya Orde Baru (Agam Primadi et al. 2019).

Pemilu serentak 2019 yang dilaksanakan pada 17 April 2019 adalah untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, dan memilih Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Pada pelaksanaan pemilihan di tempat pemungutan suara (TPS) nanti akan ada 5 (lima) surat suara berwarna dengan kriteria sebagai berikut: warna Abu-

abu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, warna Kuning untuk memilih anggota DPR RI, warna Merah untuk memilih anggota DPD RI, warna Biru untuk memilih anggota DPRD Provinsi, warna Hijau untuk memilih DPRD Kabupaten/Kota. Sebagaimana mekanisme surat suara sudah diatur dalam UU Pemilu No 7 Tahun 2017.

Dalam praktiknya, Pemilu Serentak 2019 yang semestinya sebagai sarana perwujudan demokrasi dimana rakyat memilih langsung calon yang mereka inginkan tetapi dalam pelaksanaannya dinodai dengan berbagai permasalahan. Antara lain, Pertama baik itu pelanggaran yang dibuat oleh penyelenggara pemilu sendiri karena dalam pelaksanaan tidak memegang prinsip keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Sebagaimana data yang disampaikan oleh Bawaslu bahwa terdapat 6.649 temuan yang telah didaftarkan, terdapat 548 adanya pelanggaran pidana dan 107 melakukan pelanggaran kode etik. Kedua, penanganan data yang dilakukan oleh KPU mengalami permasalahan sehingga jadwal untuk pencoblosan mundur menjadi 19 Maret 2019.

Beberapa pihak menyatakan kendala utama penundaan tersebut adalah KPU kesulitan memilah Data Pemilih secara komprehensif (yang bersinergi dengan Data Pemilih di Kemendagri), sehingga masih terjadi kesalahan berupa pendaftaran ganda,

pendaftaran dari mereka yang telah meninggal, dan tidak memperbarui pemilih yang telah pindah. tempat tinggal. Ketiga terkait dengan beban kerja KPPS. Data Kementerian Kesehatan per 16 Mei 2019, 527 petugas KPPS meninggal dunia dan 11.239 orang sakit. Dan keempat adalah Pemilu Serentak 2019 mengalami kesalahan dalam rekapitulasi perolehan suara (Ardipandanto, 2019).

Target angka partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 di Bangka Belitung

Partisipasi pemilih pemula merupakan hal yang penting dalam setiap pemilu. Pemilih pemula adalah orang-orang yang baru memenuhi syarat untuk memilih atau baru pertama kali memilih. Partisipasi pemilih pemula dalam pemilu yang tinggi akan memperkuat demokrasi dan menjamin representasi yang lebih baik dalam pemilihan umum. Berdasarkan data dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, angka partisipasi pemilih pemula di Bangka Belitung mencapai sekitar 84%, yang lebih tinggi dari rata-rata nasional pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula di Bangka Belitung relatif baik. Oleh karena itu, diharapkan bahwa target angka partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 akan setidaknya sama atau lebih tinggi dari angka tersebut. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 di Bangka Belitung, perlu

ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa seluruh pemilih pemula memahami pentingnya hak suara mereka dan berpartisipasi dalam proses pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka Belitung merupakan salah satu kelembagaan yang memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024. Adapun kegiatan yang terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah pendidikan pemilih, yang telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018. Tujuan dari pendidikan pemilih adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan Umum (Pemilu) melalui penyampaian informasi. Pendidikan pemilih melibatkan sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik pemilih, sehingga diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. KPU telah menetapkan berbagai objek atau sasaran pendidikan pemilih, termasuk keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, relawan demokrasi, dan warga internet (netizen). Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan kegiatan Pendidikan Pemilih Segmen Pemula. Kegiatan tersebut

dilaksanakan di Ruang Rapat KPU Babel pada tanggal 20 Juli, dan dihadiri oleh Anggota KPU Babel Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Fahrurrozi, serta narasumber dari Pusat Studi Universitas Bangka Belitung, Sandy Pratama, M.Si. Dalam pemaparannya, Sandy menyampaikan pentingnya pemilih untuk cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, yang meliputi pemilihan yang disertai pemahaman dan pengenalan terhadap calon serta menyalurkan hak pilih dengan baik dan benar untuk meminimalkan suara tidak sah atau kerusakan surat suara.

Dalam konteks kegiatan Pendidikan Pemilih Segmen Pemula yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Sidney Verba dan Norman H. Nie dalam teori Partisipasi Aktif, "partisipasi politik dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan keterampilan politik dan kesempatan politik." (Verba & Nie, n.d.). Dalam konteks Pendidikan Pemilih Segmen Pemula, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan politik kepada pemilih pemula sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses politik dengan lebih aktif dan cerdas pada masa depan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat memberikan kesempatan politik bagi pemilih pemula untuk mempelajari dan memahami proses politik dengan lebih baik.

Dengan keterlibatan KPU Bangka Belitung dalam meningkatkan partisipasi

pemilih pemula pada pemilu 2024, diharapkan bahwa partisipasi pemilih pemula dapat meningkat dan pemilu dapat berlangsung dengan baik dan transparan. Untuk mencapai target angka partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 di Bangka Belitung, perlu dilakukan upaya yang lebih intensif dan terorganisir. Selain upaya yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu mendatang. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk pemuda, dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Pemuda dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih pemula. Selain itu, pemuda juga dapat menjadi mentor bagi pemilih pemula dan membantu mereka memahami isu-isu yang berkaitan dengan pemilu. Selain melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, juga perlu ada kerja sama yang erat antara pemerintah dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan pendidikan politik. Pendidikan politik harus menjadi bagian dari kurikulum di sekolah-sekolah dan harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat menyelenggarakan program-program khusus untuk membantu pemilih pemula memahami proses pemilu dan memilih dengan bijak.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa seluruh pemilih pemula memiliki akses yang mudah ke tempat pemungutan suara. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun lebih banyak tempat pemungutan suara atau menempatkan tempat pemungutan suara di lokasi yang mudah dijangkau oleh semua pemilih. Selain itu, juga perlu ada upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu dan lembaga-lembaga terkait. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu memberikan informasi yang transparan dan mudah dipahami tentang proses pemilu dan prosedur pemungutan suara. Selain itu, pemerintah dan lembaga-lembaga terkait juga perlu menjamin bahwa pemilihan umum berlangsung dengan bersih dan transparan, sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap proses pemilu. Dalam rangka mencapai target angka partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 di Bangka Belitung, perlu ada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Seluruh pihak harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih pemula. Dengan partisipasi yang lebih tinggi dari pemilih pemula, diharapkan demokrasi dapat diperkuat dan representasi yang lebih baik dapat dicapai dalam pemilihan umum.

Upaya dan Strategi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Untuk Pemilih Tahun 2024

Pemilihan Umum merupakan wujud dari sistem demokrasi yang diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024 mendatang. Persiapan penyelenggaraan pemilu dilakukan jauh sebelum hari diadakannya pemilihan umum serentak. Persiapan dilakukan dengan beberapa proses yaitu diantaranya persiapan administrasi, pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan aktivitas kampanye oleh beberapa partai hingga pendidikan pemilih. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan studi terhadap KPU Provinsi Bangka Belitung. Penelitian ini mendeskripsikan tentang Upaya Dan Strategi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Untuk Pemilih Tahun 2024.

Hasil Observasi pada KPU Provinsi Bangka Belitung yaitu berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum yang akan dilaksanakan tahun 2024. KPU Provinsi Bangka Belitung sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berlokasi di Kota Pangkal Pinang telah menjalankan upaya pelaksanaan persiapan pemilihan umum tahun 2024. Upaya pelaksanaan persiapan tersebut dilakukan secara bertahap. Tahap pertama ialah pelaksanaan proses pendidikan pemilih, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu. Selain itu, terdapat

upaya upaya yang dijalankan oleh KPU Bangka Belitung seperti melakukan sosialisasi dari kota, kabupaten hingga beberapa desa. Kemudian KPU Bangka Belitung berupaya mendorong partai politik dalam melakukan kampanye dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2023 dijelaskan oleh salah satu narasumber dari KPU Provinsi Bangka Belitung bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum KPU Bangka Belitung berlandaskan pada teori partisipasi politik. Partisipasi politik menurut Maslikah Pratama Putri¹ ialah merupakan keikutsertaan warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yang bertujuan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan hak politik. Partisipasi politik dapat mempengaruhi parameter wujud demokrasi sehingga menurunnya partisipasi masyarakat akan berdampak besar bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia.

KPU Bangka Belitung melakukan upaya pelaksanaan kegiatan pendidikan terhadap segmen dari pemilih demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024. Kegiatan tersebut telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018. Pendidikan pemilih dilakukan bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait pengetahuan dan pemahaman proses penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan

kegiatan pendidikan pemilih oleh KPU Bangka Belitung dilakukan secara berkala dengan segmen yang berbeda yaitu pendidikan pemilih perempuan, pemula dan khusus disabilitas.

Pada tanggal 19 Juli 2022 merupakan tahap awal dalam kegiatan pendidikan pemilih di KPU Bangka Belitung. Lokasi kegiatan tersebut berada di ruang rapat KPU Bangka Belitung. Dalam kegiatan tersebut berisikan sambutan dan pemahaman dari beberapa narasumber. Upaya pelaksanaan kegiatan tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai proses penyelenggaraan pemilu serta mengajak partisipan dari organisasi ibu-ibu agar turut berpartisipasi dalam mengimplementasikan wujud demokrasi berupa penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Dihadiri juga oleh narasumber dari IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq yaitu Dekan dari Fakultas Tarbiyah Dr. Soleha, M. A. Beliau menyampaikan tentang peran perempuan dalam bidang sosial dan politik seperti hak perempuan dalam aktivitas politik serta hak dasar perempuan sebagai partisipan dalam penyelenggaraan pemilu.

Kemudian pada tanggal 20 Juli 2022, KPU Bangka Belitung melaksanakan kegiatan tahap kedua dengan memberikan pendidikan pada pemilih pemula yaitu pemahaman tentang berlangsungnya proses penyelenggaraan pemilu yang dihadiri oleh beberapa siswa dan mahasiswa. Pemilih

pemula merupakan masyarakat yang baru saja menggunakan hak pilihnya untuk mengikuti pelaksanaan pemilu yang telah memenuhi syarat yaitu berusia 17, single atau menikah dan tidak menjadi bagian dari anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi RI. Narasumber dalam penyampaian materi pendidikan pemilih untuk pemula yaitu bapak Sandy Pratama, M.Si., yang merupakan seorang Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Bangka Belitung. Beliau menyampaikan tentang cara penggunaan hak pilih dengan cerdas. Terdapat 2 (dua) poin penting dalam penggunaan hak pilih yaitu yang pertama adalah mengetahui atau mengenal calon yang akan dipilih, yaitu dengan mengetahui visi serta misi dari calon atau partai. Kedua, mengetahui cara melakukan pencoblosan yang tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencoblosan yang mengakibatkan suara menjadi tidak sah atau dianggap failed.

Narasumber juga memberi pemahaman agar para pemilih pemula tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh ajakan dan bujukan orang lain. Selain itu, dalam penjelasannya, pemilih diberi pemahaman tentang kecurangan yang harus dihindari dalam proses penyelenggaraan pemilu seperti, money politic atau politik uang. Pemilih pemula sering dijadikan target sebagai subjek kecurangan yaitu dengan diiming-imingi beberapa uang atau sesuatu untuk memilih calon dari partai tertentu. Hal

ini dapat merusak konsolidasi demokrasi sebagai sistem yang berlaku di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut KPU Bangka Belitung berharap mahasiswa dapat ikut serta dalam meningkatkan partisipasi politik dan menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu sebagai KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan Pengawas pemilu serta menjadi pemilih aktif dalam pemilu.

Pada tanggal 21 Juli 2022, KPU Bangka Belitung mengadakan pendidikan pemilih yang dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan yaitu penyandang disabilitas. Kegiatan tersebut diadakan di ruang rapat KPU Bangka Belitung. Narasumber yang dihadirkan adalah Nurdianti, Ketua HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Bangka Belitung. Beliau memberikan pemahaman mengenai paradigma baru bagi penyandang disabilitas dalam Undang-undang Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-undang dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dalam melakukan pemilihan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 13.

Program selanjutnya yang dijalankan oleh KPU Bangka Belitung adalah menyelenggarakan kegiatan Launching Program DP3 atau yang disebut dengan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Program DP3 merupakan program unggulan yang direncanakan oleh KPU RI guna membentuk kader pemilu yang menjangkau

hingga kelurahan dan desa serta menjangkau seluruh pelosok nusantara. Launching program DP3 dilaksanakan di Kelurahan Bintang Kota Pangkalpinang bersama KPU Kota Pangkalpinang pada hari tanggal 28 Desember 2022.

Memberikan Pendidikan bagi Pemilih Pemula

Program yang terus dilaksanakan oleh KPU adalah melakukan pendidikan pemilih. Dengan pondasi yang mengawali kegiatan ini ada di dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018, pendidikan pemilih dimaknai sebagai proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pemilih tentang Pemilu. Sesuai dengan yang sudah diatur bahwa pendidikan pemilih difokuskan pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik seorang pemilih. Mengingat proses yang akan diubah menasar 3 (tiga) aspek diatas maka sebagai instansi yang melakanakan kegiatan demokrasi ini harus berupaya dengan komprehensif dan berkelanjutan dalam kegiatan Pendidikan pemilih. KPU juga memfokuskan target pendidikan pemilih yaitu pemilih pemula yang digolongankan orang yang untuk pertama kalinya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kegiatan ini bertujuan untuk penyampaian informasi kepada pemilih pemula untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman,

dan kesadaran pemilih tentang Pemilu, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih Segmen Pemula sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan tahun 2024 khususnya di Bangka Belitung. Hal ini memang dipersiapkan untuk pemilu dan pemilihan selanjutnya serta mengajak untuk bekerjasama dalam mensukseskan pemilu dan pemilihan di tahun 2024.

Kegiatan ini difokuskan pada peran pemilih pemula yang ikut serta dalam membangun negeri ini, melalui proses pemilu. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para pemilih yang memang belum pernah mencoblos, memiliki kesadaran yang tinggi terkait demokrasi, memilih dengan cerdas, tidak mudah dipengaruhi dengan pilihan orang tuanya ataupun karena adanya iming-iming materi dalam calon tertentu. KPU Provinsi Bangka Belitung juga berharap agar para mahasiswa secara langsung ikut berperan aktif sebagai penyelenggara baik itu sebagai KPPS dan pengawas, sebagai peserta dalam peran sebagai pemilih aktif. Praktik langsung para mahasiswa baik sebagai penyelenggara, peserta maupun pemilih ini akan menjadi pondasi para pemilih pemula pada Pemilu serentak Tahun 2024. Dengan pondasi ini maka pada gelaran Pemilu 2024 mereka tidak akan canggung lagi untuk aktif berpartisipasi

sebagai pemilih bahkan sebagai penyelenggara pemilu.

Kesimpulan

Mengenai upaya dan strategi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, KPU Provinsi Bangka Belitung sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berlokasi di Kota Pangkal Pinang telah menjalankan upaya pelaksanaan persiapan pemilihan umum tahun 2024. Di mana upaya pelaksanaan persiapan tersebut dilakukan secara bertahap, yakni adanya pelaksanaan proses pendidikan pemilih dan juga melakukan sosialisasi dari kota, kabupaten hingga beberapa desa. Kemudian, KPU Bangka Belitung berupaya untuk mendorong partai politik dalam melakukan kampanye dan mengajak masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Dalam hal ini, hak pilih seorang pemilih harus dipergunakan dengan baik. Untuk itu, dalam penggunaannya kita harus mengetahui atau mengenal calon yang akan dipilih, yakni dengan mengetahui visi serta misi dari calon atau partai. Kemudian, mengetahui cara melakukan pencoblosan yang tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pencoblosan yang mengakibatkan suara menjadi tidak sah. KPU juga memfokuskan target pendidikan pemilih yakni pemilih pemula yang digolongkan orang yang pertama kalinya berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di mana KPU

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan kegiatan Pendidikan Pemilih Segmen Pemula sebagai upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 dan mensukseskan pemilihan di tahun 2024 ini. KPU Provinsi Bangka Belitung juga berharap agar para mahasiswa secara langsung ikut berperan aktif sebagai penyelenggara, baik itu sebagai KPPS dan pengawas dalam pemilu.

Pemilu Pada Tahun 2019 merupakan salah satu contoh realisasi dari eksistensi dan indikasi pemilih pemula dalam konstestasi politik yang dilaksanakan 5 tahun sekali, Pemilu Serentak 2019 merupakan salah satu konstestasi politik terbesar dalam sejarah perpolitikan Indonesia dan termasuk didunia. Oleh karena itu, dalam penyelenggarannya diperlukan kerja ekstra antar lembaga negara guna mendukung pemilu serentak ini benar-benar elektoral. Dalam praktiknya, ada beberapa permasalahan yang menonjol dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang diurai oleh Ardipnananto (2019), antara lain pertama, penanganan logistik pemilu. Secara nasional, ada 10.520 TPS yang mengalami kekurangan logistik pemilu. Kasus kotak suara tidak bersegel yang diterima KPPS juga terjadi di 6.474 TPS. Selain itu, ada juga kasus tukar menukar surat suara antar Daerah Pemilihan atau antar TPS. Berdasarkan data Bawaslu, kasus ini terjadi di 3.411 TPS. Kedua, terkait penanganan data pemilih.

Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 3 (DPThp 3) yang dilakukan KPU baru selesai pada 8 April 2019, yakni 9 hari sebelum hari H Pemungutan Suara. Artinya mundur 21 hari dari jadwal yang ditetapkan KPU, yakni 19 Maret 2019. Selain itu mengenai Target angka partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 di Bangka Belitung sendiri Berdasarkan data dari Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019, angka partisipasi pemilih pemula di Bangka Belitung mencapai sekitar 84%, yang lebih tinggi dari rata-rata nasional pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pemilih pemula di Bangka Belitung relatif baik.

Oleh karena itu, diharapkan bahwa target angka partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 akan setidaknya sama atau lebih tinggi dari angka tersebut. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024 di Bangka Belitung, perlu ada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa seluruh pemilih pemula memahami pentingnya hak suara mereka dan berpartisipasi dalam pemilu.

Referensi

Jurnal

Aguzman, G. (2021, July 12). *Teori Partisipasi*. Diambil kembali dari

<https://binus.ac.id/>:

https://binus.ac.id/entrepreneur/2021/07/12/teori-partisipasi/?utm_source=binustoday&utm_campaign=binustodayarticleview

Ardipandato, A. (2019). Permasalahan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019. *Kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis*, XI.

babel, k. (2022, juli 21). *Ajakan Pemilih Disabilitas Untuk Berpartisipasi Pemilu Dan Pemilihan 2024*. Diambil kembali dari <https://babel.kpu.go.id/>: <https://babel.kpu.go.id/berita/baca/7864/ajakan-pemilih-disabilitas-untuk-berpartisipasipemilu-dan-pemilihan-2024#>

Kaehe, D. R. (t.thn.). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di kampung Pintareng Kecamatan tabukan Selatan Tangerang.

Prasetya, S. A. (2008). Pustaka PelajarStein dalam Catanese,. 1992:318.

Primadi, A. E. (2019). Peran pemilih pemula dalam pengawasan

- pemilu partisipatif. *JPI: Journal of Political Issues*, 1.
- Putri, M. P. (t.thn.). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 4, 30-43.
- Rivandi, S. (t.thn.). Partisipasi Politik Dan Partai Politik (Studi Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dan Peran Pks Dalam Pilkada Tahun 2018 Di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat) . *Bachelor's thesis, Fisip UIN Jakarta*.
- Surbakti, R. Memahami Ilmu Politik.
- Website**
- Aguzman, G. (2021, July 12). *Teori Partisipasi*. Diambil kembali dari <https://binus.ac.id/>:
https://binus.ac.id/entrepreneur/2021/07/12/teori-partisipasi/?utm_source=binustoday&utm_campaign=binustodayarticleview
- babel, k. (2022, juli 21). *Ajakan Pemilih Disabilitas Untuk Berpartisipasi Pemilu Dan Pemilihan 2024*. Diambil kembali dari <https://babel.kpu.go.id/>:
<https://babel.kpu.go.id/berita/baca/7864/ajakan-pemilih-disabilitas-untuk-berparticipasipemilu-dan-pemilihan-2024#>
- babel, k. (2022, juli 20). <https://babel.kpu.go.id/berita/baca/7862/tingkatkan-partisipasi-pemilu-2024-kpu-babel-adakanpendidikan-pemilih-untuk-pemula>. Diambil kembali dari <https://babel.kpu.go.id/>:
<https://babel.kpu.go.id/berita/baca/7862/tingkatkan-partisipasi-pemilu-2024-kpu-babel-adakanpendidikan-pemilih-untuk-pemula>
- babel, k. (2022, Desember 28). *Launching Program Dp3 Di Kelurahan Bintang Kota Pangkalpinang*. Diambil kembali dari <https://babel.kpu.go.id/>:
<https://babel.kpu.go.id/berita/baca/7964/launching-program-dp3->

di-kelurahan-bintang-
kotapangkalpinang

*Pendidikan Pemilih Perempuan Sebagai
Upaya Meningkatkan Partisipasi.*
(2022, Juli 19). Diambil kembali
dari [https://babel.kpu.go.id/](https://babel.kpu.go.id/https://babel.kpu.go.id/berita/baca/7861/pendidikan-pemilih-perempuansebagai-upayameningkatkan-partisipasi)
[https://babel.kpu.go.id/berita/baca/7861/pendidikan-pemilih-
perempuansebagai-
upayameningkatkan-partisipasi](https://babel.kpu.go.id/berita/baca/7861/pendidikan-pemilih-perempuansebagai-upayameningkatkan-partisipasi)

Putri, V. K. (2021, 07 12). *Partisipasi
Politik: Pengertian, Teori,
Faktor, dan Bentuknya.* Diambil
kembali dari
[https://www.kompas.com/](https://www.kompas.com/https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/12/153000269/partisipasi-politik--pengertian-teori-faktor-dan-bentuknya)
[https://www.kompas.com/skola/r
ead/2021/07/12/153000269/partis
ipasi-politik--pengertian-teori-
faktor-dan-bentuknya](https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/12/153000269/partisipasi-politik--pengertian-teori-faktor-dan-bentuknya)

sentolo, A. (t.thn.). *Partisipasi
Masyarakat Dalam Pemilu.*
Diambil kembali dari
[https://sentolo.kulonprogokab.go.
id/](https://sentolo.kulonprogokab.go.id/https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu)
[https://sentolo.kulonprogokab.go.
id/detil/129/partisipasi-
masyarakat-dalam-pemilu](https://sentolo.kulonprogokab.go.id/detil/129/partisipasi-masyarakat-dalam-pemilu)